

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 39
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 10 Oktober 2016
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Membahas rencana revisi Undang-Undang ASN 2. Membahas penyelesaian tenaga honorer 3. Membahas ferormasi birokrasi
Ketua Rapat	: Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 25 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Senin, 10 Oktober 2016 dibuka pada pukul 15.05 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan pembahasan rencana revisi Undang-Undang ASN, penyelesaian tenaga honorer dan ferormasi birokrasi
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap paparan komitmen dan rencana program Kementerian PANRB dan meminta Kementerian PANRB untuk terus meningkatkan kinerjanya dan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong upaya terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

- B. Komisi II DPR RI mendukung KASN dalam upaya menjaga netralitas ASN terutama pada saat diselenggarakannya pilkada/pemilu, dan meminta kepada KASN untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam rangka mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN.
- C. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada KASN atas masukan yang disampaikan terkait rencana revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi II DPR RI.
- D. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB untuk tidak melakukan perekrutan ASN sebelum revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN diselesaikan oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah.
- E. Terhadap permasalahan Tenaga Honorer Kategori II, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB bersama dengan BKN untuk menyiapkan rumusan kebijakan terkait penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.40 WIB.

Jakarta, 10 Oktober 2016
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA
A-345